

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Kabupaten Mukomuko

Rixsy Wily Fadila¹, Zikri Alhadi²

^{1,2}Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : rixsywilyfadila20@gmail.com, zikri.ianunp@mail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, teknik untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sedangkan teknik untuk melakukan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi dimana teknik triangulasi merupakan teknik yang tidak hanya bisa mempercayakan satu sumber saja, harus membandingkan dengan sumber lain. Hasil penelitian ini adalah a. Faktor Pendorong seperti 1) Anggaran dari pemerintah yang cukup dan 2) Aparatur keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan b. Faktor Penghambat seperti 1) Kesadaran masyarakat yang masih kurang, 2) Pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim.

Kata Kunci : *Efektivitas, Mitigasi Bencana, Gempa Bumi, Tsunami*

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of earthquake disaster mitigation with the potential for a tsunami in Mukomuko Regency and to find out what factors support and hinder the effectiveness of earthquake disaster mitigation with a potential tsunami in Mukomuko Regency. This research is a qualitative research using descriptive methods, techniques for collecting data through interviews, observations, and documentation studies, while the techniques for analyzing data are through data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. To test the validity of the data, that is by using the triangulation technique where the triangulation technique is a technique that cannot only rely on one source, it must compare with other sources. The results of this study are a. Pushing Factors such as 1) Sufficient government budget and 2) Community involvement apparatus in disaster mitigation and b. Inhibiting factors such as 1) Lack of public awareness, 2) Procurement of facilities and infrastructure is still minimal.

Keywords: *Effectiveness, Disaster Mitigation, Earthquake, Tsunami*

PENDAHULUAN

Pemerintah menanggulangi bencana sebagai langkah tingginya risiko pasca bencana sesuai dengan dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007. Nurjanah dkk, (2012) menyatakan pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana dimulai dari inisiatif dan komitmen pemerintah. Kemudian berkaitan dengan Penanggulangan pasca bencana

yang menghantarkan perubahan paradigma mengatasi bencana alam di wilayah Indonesia. Pengubahan dari yang sebelumnya penanganan bencana sifatnya berdasarkan respons terhadap kedaruratan maka digeser dengan kegiatan-kegiatan yang preventif, untuk meminimalisir risiko (mitigasi).

Dengan adanya UU No.24 Tahun 2007 muncullah kebijakan tentang perencanaan termasuk pendanaan didalam penanggulangan suatu bencana. Dengan adanya UU tersebut, ada beberapa hal yang penting di perhatikan antara lain pergantian suatu paradigma mengenai musibah yang hendak terfokus pada kondisi saat sebelum musibah ataupun meminimalisir suatu resiko, penyelesaian suatu musibah hendak bertabiat lebih proaktif tetapi tidak lagi bertabiat reaktif, penguasa memprioritaskan kesertaan dari warga dari pada bertabiat memahami, daerah dalam penyelesaian musibah bukan lagi hak telak dari penguasa yang terletak dipusat melainkan telah jadi tanggung jawab di wilayah ataupun telah terdesentralisasi ke wilayah bagus dalam perihal penganggaran bayaran ataupun buat suatu cara pengumpulan sesuatu kebijaksanaan khalayak.

Upaya penanggulangan tersesusun dan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jika ditinjau melalui aspek perencanaan pembangunan yang pada tahun 2015-2019 berkenaan dengan penanggulangan bencana dan stabilisasi ruang hidup. Pemerintah pusat atau daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pembuatan perencanaan dan pembangunan didalamnya termasuk unsur-unsur langkah keputusan pemerintah atas bencana.

Setelah memasukkan mitigasi bencana kedalam skedul kebijaksanaan, cara formulasi, penerapan serta penilaian kebijaksanaan hendak memastikan arah kebijaksanaan penyelesaian musibah dalam pambangunan wilayah. Paradigma penyelesaian musibah bersumber pada Hukum No 24 Tahun 2007 bisa membagikan daya yang lumayan pada wilayah buat membuat bentuk pembangunan yang serasi dengan konsisi di tiap wilayah. Tujuannya buat tingkatkan keahlian penguasa wilayah dalam mengalami musibah alam lewat penangkalan serta kesiapsiagaan musibah. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah butuh menggabungkan langkah- langkah mitigasi musibah yang membidik pada wilayah rawan musibah.

Langkah penangkalan serta mitigasi musibah bisa dicoba dengan cara sistemis ataupun kultura (non sistemis). dengan cara sistemis usaha yang dicoba buat kurangi kerentanan (vulnerability) kepada musibah merupakan rekayasa teknis gedung jenjang musibah. Sebaliknya dengan cara kultural usaha buat kurangi kerentanan (vulnerability) kepada musibah merupakan dengan metode mengganti paradigma, tingkatkan wawasan serta tindakan alhasil tersadar warga yang kuat. Mitigasi kultural tercantum didalamnya merupakan membuat warga hirau kepada lingkungannya buat meminimalkan terbentuknya musibah

Banyaknya musibah alam yang terjalin di Indonesia membagikan akibat serta akibat kepada warga yang bisa dialami bagus langsung ataupun tidak langsung. Akibat langsung dikala terbentuknya musibah alam yang berakibat pada warga merupakan banyak korban jiwa, lenyap serta hadapi luka- luka. Sebaliknya akibat tidak langsung antara lain merupakan banyak terbentuknya kehancuran gedung semacam perumahan masyarakat, Rumah Sakit, Puskesmas, Gedung Sekolah serta alat kesehatan yang lain. Tidak hanya itu, bekal pangan yang tidak memenuhi ialah terbentuknya penyusutan kesehatan dalam waktu jauh serta pula pengaruhi dengan cara langsung tingkatan pelampiasan keinginan vitamin korban musibah.

Berdasarkan data IRBI tahun 2021, Provinsi Bengkulu memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 157.14 (Tinggi) termasuk daerah dengan kategori risiko tinggi bencana.

Indeks Risiko Bencana Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 1. Indeks Risiko Bencana Provinsi

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1.	Bengkulu Utara	186.3	Tinggi
2.	Kaur	196.9	Tinggi
3.	Seluma	165.7	Tinggi
4.	Mukomuko	172.3	Tinggi
5.	Bengkulu Selatan	186.4	Tinggi
6.	Bengkulu Tengah	167.8	Tinggi
7.	Kota Bengkulu	147.5	Tinggi
8.	Rejang Lebong	92.6	Sedang
9.	Kepahiang	138.0	Sedang
10.	Lebong	118.0	Sedang

Sumber: *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021*

Peneliti juga melakukan observasi dengan Bapak Ramdani, S.E. M.Si selaku Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko pada hari Rabu 16 Maret 2022. Beliau mengatakan

"...Permasalahan gempa bumi di Kabupaten Mukomuko sangat berpotensi. Dalam masalah upaya mitigasi bencana, pihak kami telah melakukan sosialisasi dan melaksanakan program Desa Tangguh Bencana yang diberikan oleh pusat. Namun, upaya tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak signifikan dan ditahun sekarang belum dilaksanakan upaya pengurangan risiko bencana tersebut dikarenakan kurangnya anggaran dari pusat. Di Kabupaten Mukomuko mempunyai 8 (delapan) jenis potensi bencana, antara lain: gempa bumi, tsunami, badai, gelombang tinggi, tanah longsor, banjir, penyakit/wabah, dan konflik sosial. Selain itu, jika dilihat masalah efektivitas, kami belum bisa mengatakan efektif dikarenakan banyaknya kendala yang ada".

Kabupaten Mukomuko secara fisik, terutama wilayah pemukiman warga berada didaerah pesisir pantai sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Selain itu, di wilayah laut Mukomuko juga terdapat gunung berapi aktif yang berada di dalam dasar laut yang menjadi pemicu terjadi gempa bumi. Kondisi ini dapat mengancam keselamatan jiwa serta harta benda penduduk yang berada di wilayah tersebut terumata Kota Mukomuko. Perencanaan di kawasan rawan bencana perlu adanya pencegahan. Termasuk pencegahan adalah simulasi bencana, penyuluhan baik dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun dari Dinas Kesehatan, sistem monitoring informasi, serta peringatan dini.

Tabel 2. Ringkasan Kondisi Kapasitas di Kabupaten Mukomuko

No	Indikator Kapasitas	Jumlah Indikator	Sesuai Standard/ sudah Tersedia/ sudah Ada/sudah Melakukan	Kurang Standard/ Tidak Tersedia/ Belum Ada/ Belum Melakukan
1.	Kebijakan/Peraturan	10	7	3
2.	Penguatan Kapasitas	17	13	4
3.	Peringatan Dini	5	5	0
4.	Mitigasi	4	4	0
5.	Kesiapsiagaan	15	15	0
		51	44	7

Sumber: *Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota Rawan Bencana Kabupaten Mukomuko*

Lebih lanjut, hasil observasi peneliti dilapangan dengan Ibu Rika Amriani, S.Sos sebagai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Mukomuko. Beliau mengatakan :

“...Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi sudah dilakukan sosialisasi dan simulasi bencana. Biasanya kegiatan tersebut kami laksanakan setiap tahun dan kami juga membentuk Desa Tangguh Bencana dan merekrut masyarakat sebagai petugas relawan. Tetapi, sudah 2 (dua) tahun belakangan ini kami tidak melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat di karena pandemi dan hanya dilakukan secara online maupun webinar saja”.

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik mengangkat sebagai bahan penelitian dengan judul “Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami Di Kabupaten Mukomuko”.

METODE

Jenis enelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, teknik untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sedangkan teknik untuk melakukan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi dimana teknik triangulasi merupakan teknik yang tidak hanya bisa mempercayakan satu sumber saja, harus membandingkan dengan sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Kabupaten Mukomuko

Adapun faktor pendukung dan penghambat efektivitas mitigasi Bencana Gempa Bumi berpotensi Tsunami di Kabupaten Mukomuko antara lain, sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko antara lain, sebagai berikut :

1) Anggaran dari pemerintah yang cukup

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Ibuk Christina Damayanti S.Sos Selaku Fungsional Penyuluh Sosial Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas. Beliau menjelaskan :

“...Ya, kalau dari segi anggaran yang kita pantau yah untuk BPBD Kabupaten Mukomuko dalam kategori cukup lah yah karena memang daerah Kabupaten Mukomuko ini adalah daerah pertemuan lempeng yang sudah terbiasa dengan aktivitas dengan gempa tektonik”.

Senada dengan Ibuk Christina Damayanti S.Sos, Bapak Ramadhani SE Selaku Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko. Beliau menerangkan :

“...Kalau kita berbicara segi anggaran, dari Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah kita di Kabupaten Mukomuko diberikan anggaran yang cukup dan dikhusus kan karena ini semua berdasarkan kebutuhan kita di Kabupaten Mukomuko yang sangat rawan terhadap potensi gempa bumi”.

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dari efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko yaitu anggaran dari pemerintah yang cukup dikarenakan Kabupaten Mukomuko perlu diberikan perhatian khusus tentu hal ini disebabkan oleh Kabupaten Mukomuko yang rawan dan sering menjadi langganan gempa bumi.

2) Aparatur dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Ramdani SE Selaku Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko. Beliau mengungkapkan :

“...Alhamdulillah, kita di BPBD Kabupaten Mukomuko memiliki personil sebanyak 37 orang. Saat terjadi bencana gempa bumi kita semua langsung bekoordinasi dengan TNI, Polri, Masyarakat, dan Ormas selingkup Kabupaten Mukomuko”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Ampera Arazak Selaku Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Mukomuko. Beliau menjelaskan :

“...Ya, kita sebagai warga sekolah alhamdulillah untuk mitigasi bencana gempa yang pelaksanaannya disekolah kita dilibatkan”.

Senada dengan Bapak Ampera Arazak, Landika Putra Anugrah Selaku siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Mukomuko. Dia menerangkan :

“... Kami semua sebagai siswa dan seluruh warga sekolah di SMA Negeri 1 Mukomuko berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Mukomuko. Kami banyak belajar, kalau terjadi gempa bumi saat kami berada dilokasi sekolah dan didalam kelas, apa yang harus kami lakukan?. Dari simulasi mitigasi bencana ini kami belajar dan paham upaya pertama apa yang perlu kami lakukan dalam menyelamatkan diri”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Dr. Muhammad Fadly S.STP M.Si Selaku Camat di Kabupaten Mukomuko. Beliau menjabarkan :

“...Ya, benar di Kecamatan Mukomuko juga dilakukan upaya mitigasi bencana gempa bumi dan kami disini juga melibatkan masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat banyak yang mau ikut berpartisipasi karena ini adalah penting untuk mereka semua”.

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dari efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko yaitu aparatur dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana. BPBD memiliki personil yang cukup serta dengan sigap bekoordinasi dengan TNI, Polri, Masyarakat, Linmas, Pihak Kecamatan dalam mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko.

b. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko antara lain, sebagai berikut :

1) Kesadaran masyarakat yang masih kurang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Erwin SH Selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Mukomuko. Beliau menjelaskan :

“...Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mukomuko ini dipandang adalah suatu hal yang sudah biasa yah karena sudah sangat sering terjadi. Setiap gempa, Pemerintah Kabupaten Mukomuko selalu memberikan informasi yang akurat apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak. Tetapi, kita berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko agar selalu waspada”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Ibuk Ratna Dewi Selaku Masyarakat Kabupaten Mukomuko. Beliau mengungkapkan :

“...Di Kabupaten Mukomuko ini kalau terjadi gempa bumi yah sudah biasa, kami sebagai masyarakat tidak panik tuh karena sudah sangat sering kami mengalaminya”.

Senada dengan Ibuk Ratna Dewi, Ibuk Winda Afriani Selaku Masyarakat Kabupaten Mukomuko juga menjelaskan :

“...Kita sebagai masyarakat Kabupaten Mukomuko sudah tidak asing lagi dengan gempa bumi karena setiap saat selalu terjadi”.

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang karena menganggap gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mukomuko sudah terlalu sering dan dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa.

2) Pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Ramdani SE Selaku Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko. Beliau menerangkan :

“...Ya, kita akui kita belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Sebagai daerah yang aktif terjadinya gempa bumi ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat agar BPBD Sumbar dengan BPBD Kabupaten Mukomuko mau saling bekoordinasi dan bersinergi. Kita sangat butuh sirine penanda gempa ini berpotensi tsunami atau tidak, kalau beritanya dari BMKG yah tentu sifatnya masyarakat menunggu, kalau sirine bunyi ya jelas ini gempa berpotensi tsunami sehingga masyarakat akan berfikir untuk melakukan penyelamatan seperti apa”.

Dari uraian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko yaitu pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim. BPBD Kabupaten Mukomuko hingga saat ini belum memiliki sirine penanda gempa bumi tersebut berpotensi tsunami atau tidak.

SIMPULAN

Adapun faktor pendukung dan penghambat efektivitas mitigasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko antara lain, sebagai berikut :Faktor Pendorong yaitu Anggaran dari pemerintah yang cukup dan Aparatur dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana sedangkan Faktor Penghambat yaitu Kesadaran masyarakat yang masih kurang dan Pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afner Son Wangka, dkk. 2018. Daya guna Tubuh Penyelesaian Musibah Wilayah Dalam Mengatasi Musibah Banjir Bandang Di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Prodi Ilmu Rezim, Fakultas Ilmu Sosial serta Politik, Universitas Sam Ratulangi. Vol, 1. Nomor, 1.
- Cece Syahyanti, dkk. 2020. Daya guna Penerapan Kedudukan Golongan Siap sedia Musibah Kelurahan Olo Dalam usaha Mitigasi Musibah Guncangan Alam Serta Tsunami Di Area Tepi laut Padang. Prodi Ilmu Administrasi Negeri, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negara Padang. Vol, 2. Nomor, 2.
- Dedy Hartono, dkk. 2021. Analisa Asal usul, Akibat, serta Penyelesaian Musibah guncangan alam pada dikala endemi Covid- 19 Di Sulawesi Barat. Prodi Manajemen Musibah, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan. Vol, 5. Nomor, 2.

- Ekstrak, Nukmala. 2014. Aplikasi Kewajiban serta Guna Tubuh Penyelesaian Musibah Wilayah (BPBD) di Kabupaten Maros. Makasar Universitas Hasanuddin.
- Ferad, Puturuhu. 2015. Mitigasi Musibah serta Penginderaan Jauh. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Riset Kualitatif. Versi Perbaikan Edisi 30. Bandung: Anak muda Rosdakarya.
- Noor, Djauhari. 2011. Ilmu bumi Buat Pemograman. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Profil Penyelesaian Darurat Kesehatan Kabupaten atau Kota Rawan Musibah Kabupaten Mukomuko. 2016. Pusat Darurat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Richard Meter. Steers, 1999. Daya guna Badan. Yogyakarta: Pustaka Berlatih.
- Roni Ekha Putra. 2018. Mitigasi Penurunan Resiko Musibah Guncangan Alam Dari Perspektif Aplikasi Kebijaksanaan. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Sularso H. S. Hengkelare, dkk. 2021. Mitigasi Resiko Musibah Banjir Manado. Prodi S1 Pemograman Area serta Kota. Universitas Sam Ratulangi. Vol, 8. Nomor, 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.